

SKRIPSI

**DINAMIKA PENGATURAN PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
(STUDI KASUS PADA PARTAI NASDEM PERIODE 2009-2024)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

LATIFAH TUZAHRAH

NIM. 2210111100

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H

Prima Widya Putri, S.H.,M.H


FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Latifah Tuzahrah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/02 Desember 2003 b. Nama Orang Tua : Akmal c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2210111100	f. Tanggal Lulus : 22 April 2026 g. Prediket Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan i. IPK : 3,76 j. Alamat : Tanah Datar	

DINAMIKA PENGATURAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

(STUDI KASUS PADA PARTAI NASDEM PERIODE 2009-2024)

(Latifah Tuzahrah, 2210111100, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 78 Halaman, 2026)

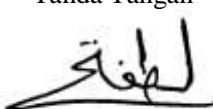
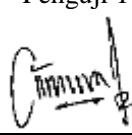
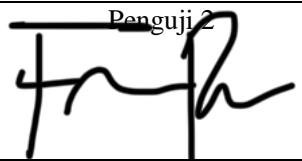
ABSTRAK

Penerapan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan di Indonesia merupakan upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik. Namun demikian, meskipun Partai NasDem Kota Padang telah memenuhi ketentuan tersebut dalam daftar calon legislatif periode 2009–2024, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang masih berada di bawah 30%. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *pertama* Dinamika pengaturan pencalonan perempuan dan problematika dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang; *kedua*, apa saja faktor yang memengaruhi penurunan keterwakilan perempuan pada Partai NasDem Kota Padang; dan *ketiga*, bagaimana upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Partai NasDem Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengaturan pencalonan perempuan mengalami perkembangan dari kebijakan persuasif menjadi imperatif melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat problematika, seperti pemenuhan kuota yang bersifat administratif, belum optimalnya penempatan calon perempuan pada posisi strategis, serta belum adanya jaminan keterpilihan perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Selain itu, penurunan keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perilaku pemilih yang pragmatis, minimnya ketokohan perempuan, keterbatasan kapasitas kader perempuan, serta kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dengan adanya program NasDem memanggil, Instruksi Struktur Organisasi Partai dan Pemberdayaan pengurus perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan tidak cukup dicapai melalui pemenuhan kuota administratif, melainkan memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, komitmen partai politik, serta perubahan budaya politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil (outcome), guna mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih adil dan substantif dalam lembaga legislatif.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, Kuota 30 Persen, Partai NasDem, DPRD Kota Padang

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 22 April 2026.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji 1 	Penguji 2 
Latifah Tuzahrah	Beni Kharisma Arrasuli, SH.I.,LL.M	Fadli Ramadhani, S.H., M.H.

Mengetahui,


Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Latifah Tuzahrah	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Bukittinggi/December 02 th , 2003 b. Parents' Name : Akmal c. Faculty : Law d. CP : Constitutional Law e. No. BP : 2210111100	f. Graduation Date : April 22 st , 2026 g. Pass Predicate : With Honors h. Study Durations : 3 Years 8 Month i. GPA : 3,76 j. Address : Tanah Datar	

DYNAMICS OF REGULATING THE CANDIDACY OF LEGISLATIVE MEMBERS FOR WOMEN'S REPRESENTATION IN THE PADANG CITY REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (CASE STUDY ON THE NASDEM PARTY 2009–2024)

(Latifah Tuzahrah, 22101111, Faculty of Law, Andalas University, Concentration Program Constitutional Law, 77 Pages, 2026)




ABSTRACT

The implementation of the 30% quota for female legislative candidates in Indonesia is an effort to encourage gender equality in politics. However, even though the Padang City NasDem Party has fulfilled these provisions in the list of legislative candidates for the 2009-2024 period, the number of women elected as members of the Padang City DPRD is still below 30%. In addition, affirmative policies that focus on the candidacy stage have not been able to fully guarantee women's representation at the election stage. The formulation of the problems in this study includes: first, how are the dynamics of the regulation of women's candidacy and the problems in fulfilling women's representation in the Padang City DPRD; second, what are the factors that affect the decline in women's representation in the Padang City NasDem Party; and third, how to increase women's representation in the Padang City NasDem Party. This study uses an empirical legal method with primary data obtained through interviews as well as secondary data from laws and regulations and literature. The data is analyzed qualitatively. The results of the study show that the dynamics of regulating women's candidacy have developed from persuasive policies to imperatives through various regulations, ranging from Law Number 12 of 2003 to the Constitutional Court Decision Number 169/PUU-XXII/2024. However, in its implementation, there are still problems, such as the fulfillment of administrative quotas, the lack of optimal placement of female candidates in strategic positions, and the lack of guarantees of women's electability in the open proportional election system. In addition, the decline in women's representation is influenced by several factors, namely pragmatic voter behavior, the lack of female figures, limited capacity of female cadres, and the strong patriarchal culture in society. Efforts that can be made to increase women's representation include the NasDem program calling, Party Organizational Structure Instruction and Empowerment of women administrators. This study concludes that women's representation is not enough to be achieved through the fulfillment of administrative quotas, but requires synergy between strong regulations, political party commitments, and changes in people's political culture. Therefore, it is necessary to strengthen affirmative policies that are more comprehensive and outcome-oriented, in order to realize more equitable and substantive representation of women in the legislature.

Keywords: *Women's Representation, Political Parties, 30 Percent Quota, NasDem Party, Padang City DPRD*

This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on April, 22st, 2026

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Latifah Tuzahrah	Beni Kharisma Arrasuli, SH.I.,LL.M	Fadli Ramadhani, S.H., M.H.

Know,

Chair of the Department of Administrative Law: **Arfiani, S.H., M.H.**



Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer
No. Faculty Alumni	Name: Signature:
No. University Alumni	Name: Signature: